

ANALISIS PENGADAAN MAKANAN BERGIZI DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SIMANAERE KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

Agnesti Kartika Zebua¹, Maria Magdalena Bate'e², Martha Surya Dinata Mendrofa³,
Nanny Artatina Buulolo⁴

^{1,2,3,4}Prodi Manajemen Universitas Nias

¹agneszebua824@gmail.com, ²maria.batee82@gmail.com, ³martha.mendrofa@gmail.com, ⁴nannyartatinabl@gmail.com

ABSTRAK

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Masih terdapat bayi dan balita di Desa Simanere yang mengalami stunting yang cukup tinggi. Adapun penyebab terjadinya stunting dikarenakan masalah perekonomian keluarga yang tergolong kurang mampu, belum terpenuhinya penyediaan makanan sehat serta kurangnya penerapan hidup sehat oleh keluarga. Pemerintah Desa Simanaere melakukan upaya pencegahan stunting melalui pengadaan makanan bergizi bagi bayi dan balita, namun masih belum berjalan maksimal dikarenakan pelaksanaannya tidak berjalan secara rutin dan berkesinambungan setiap bulannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penyediaan makanan bergizi dalam penanganan stunting di Desa Simanaere. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terjadi akibat tidak lancarnya proses pencairan anggaran untuk membiayai pengadaan makanan bergizi, sehingga kesimpulan dari penelitian ini bahwa terjadinya keterlambatan penyaluran makanan bergizi untuk bayi dan balita di Desa Simanere akibat proses pencairan anggaran dari instansi terkait yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sehingga disarankan agar Desa Simanaere berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dan instansi terkait dalam hal penyediaan bantuan makanan bergizi untuk bayi dan balita.

Kata kunci: pengadaan; makanan bergizi; stunting; penggunaan dana desa

ABSTRACT

Stunting is a condition of growth failure in children (body and brain growth) due to malnutrition for a long time. So the child is shorter than normal children his age and has delays in thinking. There are still babies and toddlers in Simanere Village who experience quite high levels of stunting. The causes of stunting are due to the economic problems of families who are classified as underprivileged, the lack of provision of healthy food and the lack of implementation of healthy living by families. The Simanaere Village Government is making efforts to prevent stunting by providing nutritious food for babies and toddlers, but it is still not running optimally because the implementation does not run regularly and continuously every month. The aim of this research is to find out the extent of providing nutritious food in handling stunting in Simanaere Village. The method used is a qualitative approach. The research results show that the main problem occurs due to the budget disbursement process not running smoothly to finance the procurement of nutritious food, so the conclusion from this research is that there is a delay in the distribution of nutritious food for babies and toddlers in Simanere Village due to the budget disbursement process from the relevant agencies which takes months. . So it is recommended that Simanaere Village coordinate with the Gunungsitoli City Health Service and related agencies in providing nutritious food assistance for babies and toddlers.

Keywords: procurement; nutritional food; stunting; use of village funds

PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 salah satu permasalahan pertumbuhan yang kerap terjadi pada bayi dan balita adalah tentang permasalahan pertumbuhan bayi yang tidak sesuai dengan usia pada bayi atau permasalahan ini sering disebut stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Salah satu kunci kesuksesan pencegahan stunting menurut Kementerian Kesehatan adalah pemantauan gizi dan pengukuran berat badan bayi dan balita yang dilakukan kader masyarakat di posyandu. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kesehatan dan gizi. Kesehatan ini dimulai sejak dalam kandungan termasuk asupan makan bergizi yang dikonsumsi oleh ibu selama mengandung. Apabila gizi yang diasup oleh tubuh tidak mencukupi maka hal tersebut menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terhambat. Status gizi pada balita merupakan salah satu indikator kesehatan pada program SDGS (Sustainable Development Goals) setiap tahunnya. Pemantauan status gizi pada balita diukur berdasarkan Umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dan hasil pemeriksaan antropometri tinggi badan berdasarkan umur adalah kurang.

Seperti yang diungkapkan oleh (Fatmaningrum, Nadhiroh, Raikhani, Utomo, & Masluchah, 2022), Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak menjadi lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah penyediaan suplemen kesehatan dan makanan bergizi yang mengandung nutrisi penting untuk anak-anak dan ibu hamil. Namun, penyediaan suplemen kesehatan ini perlu dikelola dengan baik melalui perencanaan Manajemen yang efektif.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah dan menangani pertumbuhan stunting adalah dengan melakukan pengadaan makanan bergizi bagi bayi dan balita. Dalam tahap pengadaan makanan bergizi ini maka dilakukan sebuah penyaluran yang berhubungan dengan apa saja makanan yang akan hendak diberikan kepada bayi dan balita untuk menangani dan mencegah pertumbuhan stunting. Pada tahap pengadaan makanan bergizi ini dilakukan sebuah upaya agar proses pelaksanaan kegiatan pengadaan makanan bergizi ini bisa berjalan maksimal dan bisa berfungsi secara efisien. Agar proses pengadaan makanan bergizi ini dapat dilaksanakan dengan efisien maka hal utama yang perlu dipahami oleh organisasi adalah bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses pengadaan tersebut, selain itu organisasi juga harus memahami tentang apa itu pengadaan serta apa tujuan dari pengadaan serta apa saja manfaat dari pengadaan itu sendiri. Menurut Febriawati dalam (Sembiring & Siliwangi, 2017) pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya. Menurut TIM REDAKSI BIP.2017 Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Berdasarkan pengertian dari teori pengadaan yang telah disampaikan diatas dapat diketahui bahwa pengadaan merupakan sebuah ilmu manajemen yang sifatnya untuk merealisasikan kebutuhan yang sudah direncanakan mulai dari tahap awal sampai tahap pelaksanaannya. Demikian juga dalam hal penanganan stunting yang dilakukan di Desa

Simanaere maka diperlukan sebuah upaya yang efektif untuk penanganannya. Salah satu upaya yang cukup efisien dalam menangani stunting menurut Kementerian kesehatan adalah dengan melakukan kegiatan pengadaan makan bergizi bagi bayi dan balita.

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia tahun (SSGI), jumlah anak yang mengalami stunting adalah 4.558.889, dimana data ini masih menunjukkan angka yang masih cukup tinggi secara taraf nasional, dimana menunjukkan persentase sebesar 21% dari total keseluruhan anak yang ada di Indonesia, walaupun angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021, namun menurut WHO (World Health Organization) angka ini masih cukup tinggi dari standart yang ditentukan yakni dibawah 20%. Sedangkan jika dilihat ditingkat kabupaten/kota, data anak stunting di Kota Gunungsitoli menunjukkan angka 3.243 jiwa dan 687 jiwa di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi per akhir tahun 2021.

Melalui informasi yang didapatkan peneliti dari Kader Posyandu serta informasi dari Bidan di Desa Simanaere masih terdapat bayi dan balita yang mengalami stunting yang cukup tinggi dimana data tahun 2023 terdapat 30 bayi dan balita yang mengalami stunting di Desa Simanaere. Adapun penyebab terjadinya stunting menurut informasi dari Kader Posyandu dan Bidan Desa dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah masalah perekonomian keluarga yang tergolong kurang mampu, kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengelola makanan sehat serta kurangnya penerapan hidup sehat baik dari sisi kebersihan lingkungan maupun dari sikap sadar sanitasi kesehatan, dimana masih minimnya sarana jambanisasi yang tersedia di rumah tangga sehingga masih terdapat masyarakat yang buang air besar secara sembarangan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kebersihan lingkungan.

Namun faktor paling utama penyebab terjadinya stunting di Desa Simanaere adalah masalah tingkat perekonomian yang masih rendah, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi bayi dan balita tidak dapat dilakukan, sehingga kemudian berdampak buruk bagi bayi dan balita.

Pemerintah Desa Simanaere berupaya untuk menangani dan menurunkan angka stunting yang terjadi di Desa Simanaere. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan Anggaran Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat, yang mana penyaluran dana tersebut dilakukan dalam tiga tahap penyaluran anggaran berdasarkan tingkat kebutuhan dan program operasional yang direncanakan oleh Desa. Melalui informasi yang didapatkan peneliti dari Pemerintah Desa Simanaere, adapun program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam menangani pertumbuhan stunting adalah dengan melakukan pengadaan makanan bergizi bagi bayi dan balita yang sudah terdampak stunting serta langkah pencegahan bagi yang masih belum terdampak. Dalam perencanaan tersebut Pemerintah Desa Simanaere menganggarkan pengadaan bahan-bahan makanan berupa kacang hijau, sayur, jenis buah, daging dan bahan lainnya yang mengandung nutrisi tinggi yang nantinya bahan-bahan tersebut diolah oleh kader posyandu dan PKK menjadi bentuk makanan tambahan bergizi. Pada kegiatan pengadaan makanan bergizi ini direncanakan peran aktif dari kader posyandu dan PKK untuk memproduksi makanan tambahan yang bergizi tinggi berdasarkan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa.

Namun, seharusnya dengan adanya upaya dari Pemerintah Desa, hal ini tentu berdampak positif dengan menurunnya angka jumlah penderita stunting di Desa Simanaere. Sehingga rumusan dari masalah ini adalah adanya ketidaksesuaian antara upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan hasil yang diterima oleh masyarakat khususnya bagi bayi dan balita sebagai penerima manfaat, serta faktor apa yang menghambat pengadaan

makanan bergizi bagi penderita stunting di Desa Simanaere. Dari masalah yang telah diuraikan tersebut, peneliti bertujuan mengadakan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran serta upaya strategis penanganan stunting di Desa Simanere, serta bagaimana cara menangani hambatan terkait pengadaan makanan bergizi bagi bayi dan balita oleh Pemerintah Desa Simanere, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengadaan

Menurut Febriawati dalam (Sembiring & Siliwangi, 2017) , pengadaan merupakan kegiatan yang melaksanakan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianggarkan pada kegiatan sebelumnya. Menurut (Kristianto, 2022) disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa dalam suatu organisasi/perusahaan biasa disebut dengan departemen pembelian/purchasing. Berkaitan dengan hal tersebut ada yang membedakan fungsi *purchasing* (pembelian sebagai membeli barang-barang kebutuhan organisasi, sedangkan fungsi *procurement* (pengadaan sebagai membeli, menyewa, menukar, dan meminjam barang-barang untuk kebutuhan organisasi. Meskipun demikian kedua hal ini memiliki fungsi, pekerjaan, dan tujuan yang mirip yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan perusahaan/organisasi (bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang inventori yang berfungsi sebagai peralatan pemeliharaan) untuk mendukung kelancaran proses operasi di perusahaan. Menurut (Jusniati, Parawangi, & Wahid, 2022), pengadaan berarti upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan dilakukan dengan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti standar dan etika sesuai dengan metode pengadaan yang diterapkan sebagai pedoman pengadaan.

Menurut (Utojo, 2019), jenis pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Tujuan Pengadaan (Procurement Goal) penyelenggaraan kegiatan Pengadaan adalah mewujudkan keterpaduan untuk memperoleh barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, sumber, waktu dan tempat dengan biaya yang optimal, mewujudkan sistem Pengadaan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan sistem pengadaan strategis yang berorientasi pada optimalisasi hasil dan manfaat, memberikan akses keterbukaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi dalam proses Pengadaan untuk memperoleh tata Kelola Pengadaan yang baik, sesuai prinsip dan aturan, memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi para pihak dalam kegiatan pengadaan. Menurut (Ramazan & Najamudin, 2021) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan, yaitu komunikasi sosialisasi dan pelatihan, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Makanan bergizi

Dalam KBBI, makanan merupakan segala sesuatu yang bisa kita makan dan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan gizi merupakan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan kesehatan. Jadi, Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat tertentu yang dapat menunjang proses pertumbuhan tubuh. Gizi atau zat gizi adalah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan serta memelihara kesehatan dan sebagai sumber energi utama untuk berbagai fungsi metabolisme (Napitupulu & Karota, 2022). Di dalam tubuh manusia makanan bergizi menurut (Rachmawati, Pradanie, & Dwiwardani, 2018) memiliki tiga fungsi yang utama, antara lain sumber penghasil energi, sumber zat pembangun, dan sebagai zat pengatur.

Stunting

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (seusia). Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan seringnya infeksi, ditandai dengan tinggi badan atau tinggi badan di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan di sektor kesehatan. Sedangkan pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -200 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -300 SD (severely student). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak kecil yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan yang tidak sesuai standar, sehingga menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama diberbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Indonesia.

Menurut (Megawati & Wiramihardja, 2019), stunting dapat dicegah dengan cara mengenal ciri-ciri stunting dan cara mendeteksinya, mengetahui akibat dari stunting dan upaya pencegahannya, memahami gizi seimbang pada remaja putri, ibu hamil dan ibu anak-anak bawah dua tahun untuk mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan, dan mampu melakukan pendampingan dan memberikan informasi gizi yang tepat pada masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting.

Sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden RI terkait percepatan pengurangan penundaan pelaksanaan Indonesia Emas 2045, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk penanganan penanggulangan tersebut, yang terdiri dari anggaran kementerian pusat, /agensi. . pemerintah, dana peruntukan khusus (DAK) fisik, dan dana peruntukan khusus (DAK) nonfisik. Dengan anggaran yang tersedia untuk menangani stunting tersebut diharapkan kasus stunting di Indonesia menurun, dengan target 14% di tahun 2024.

Menurut (Arini, Mayasari, & Rustam, 2019) faktor-faktor yang menjadi penyebab stunting pada anak diantaranya zat gizi, penyakit infeksi, genetik, berat bayi lahir rendah, pendapatan keluarga, sanitasi, air bersih, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MP-ASI), serta fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Riskesdas (Survei Kesehatan Dasar) tahun 2018, prevalensi stunting pada anak kecil di Indonesia sebesar 30,8% yang berarti satu dari tiga anak kecil mengalami stunting. Data SSGBI (Survei Status Gizi Anak Indonesia) tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,7%. Sedangkan pada tahun 2021 pada data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) prevalensi stunting sebesar 24,4%, angka tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan PHI WHO (Public Health Problem Indicator), Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang yaitu >20%. Adapun upaya pencegahan stunting antara lain pemberian makanan tambahan, serta edukasi kesehatan.

Regulasi Pencairan Dan Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa Pagu Dana Desa nonBLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa). Tahapan Penyalurannya yaitu disalurkan dalam

3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III, kemudian disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda dengan menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGS Desa. Namun perlu diketahui bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai pada peruntukannya. Selain itu, menurut (Kusrawan, 2019) bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. Dalam penerapannya, aparat Pemerintah Desa harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, salah satunya Dinas PMDK. Hal ini bertujuan agar program prioritas yang direncanakan dapat tercapai. Dinas PMDK merupakan dinas yang juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Menurut (Harry Mulya Zein, Bintang Samuel Korompis, & Septiani, 2023) bahwa Dinas PMDK berperan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan desa melalui Bidang Penataan Kerja sama, Aset, dan Keuangan Desa. Fungsi ini termasuk dalam pengawasan APBD dan difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKPD.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Gunawan pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan Di Atas Kapal Dengan Metode Pemilihan Langsung Di PT. Pertamina Perkapalan dikemukakan beberapa kendala dan penyebab dari permasalahan tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan sebagai berikut:

Tahapan proses pengadaan barang dan jasa melalui cara seleksi langsung berupa rencana, yaitu rencana tahunan yang biasanya disusun oleh pemilik atau kapal, dan rencana operasional yaitu kapal. Sebuah rencana Perencanaan dan tindak lanjut berupa pengawasan dan evaluasi langsung oleh pemilik. Pembelian barang dan jasa harus dilakukan oleh pemilik. Namun implementasi di website tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Kurang koordinasi antara estimator dengan penyedia barang/jasa, dan dalam pelaksanaan pengadaan masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan hambatan untuk proses tersebut. Kurangnya jumlah pegawai/staff divisi TF3 yang mengakibatkan adanya rangkap kerja sehingga proses pengadaan tersebut tidak

berjalan sesuai 62 dengan yang diharapkan baik dari kelengkapan administrasi maupun dari realisasi anggaran yang tidak terserap sesuai plan yang direncanakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salma, 2018 “Peranan E-procurement dalam Pencegahan Fraud, Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Prov. Sulawesi Selatan” dengan menggunakan metode kualitatif dikatakan bahwa Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan E-Procurement. Dalam pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan belum berjalan efektif, dikarenakan masih adanya main mata antara penyedia jasa dan panitia pengadaan.

Berikut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizky Adrian Dyah Lituhayuh Titik Djumiarti 2017 dengan judul “Implementasi Manajemen-e-Procurement yang Baik Pada Pelayanan Jalan Tol Provinsi Jawa Tengah” dengan pendekatan deskriptif metode kualitatif, mengatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memutuskan pelaksanaan prinsip pengadaan barang/jasa di Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pada pelayanan LKPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian sudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan, hanya saja masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penelitian terdahulu berikutnya “Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “ oleh Agung Suprianto, Soesilo Zauhar, dan Bambang Santoso Haryono. Dalam penelitian ini Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Analisis penerapan sistem pengadaan elektronik ini diawali dengan analisis prosedur, kegiatan terkait hingga pengolahan informasi dan dokumen dalam sistem pengadaan elektronik; dan b) Penerapan sistem pengadaan elektronik pada proses pengadaan barang/jasa di Fakultas Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya sudah efektif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-procurement dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif, dimana tercermin pada tercapainya lima indikator efektivitas, yaitu: (a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (d) Mendukung proses monitoring dan audit; dan (e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Hasil penelitian di Kelompok Kerja ULP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya juga menunjukkan bahwa komposisi personel didalam Pokja tersebut masih didominasi oleh tenaga dari luar Fakultas Ilmu Administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Fakultas Ilmu Administrasi masih sedikit yang memiliki sertifikasi barang dan jasa. Dengan demikian, perlu diadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/ jasa secara rutin, sehingga dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang handal dan profesional didalam proses e-procurement.

Dari penelitian tersebut di atas, terdapat kesamaan dalam proses penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti saat ini dimana kata kunci yang merupakan landasan penelitian adalah pengadaan. Pengadaan pada penelitian terdahulu di atas baik pengadaan barang ataupun jasa memiliki banyak kekurangan baik dari sisi administrasi, kebutuhan sumber daya manusia hingga adanya oknum yang secara sengaja memperlambat proses pengadaan. Sehingga hal tersebut menjadi masalah utama dalam proses perencanaan hingga evaluasi kinerja suatu organisasi atau pun instansi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada lingkungan alam dengan cara menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi ketika peneliti menjadi instrumen utamanya (Setiawan & Anggito, 2018). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam suatu perusahaan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, namun melalui pengumpulan data, analisis dan diinterpretasikan. Pada penelitian pendekatan kualitatif bentuk data berupa kalimat yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Landasan teori menjadi pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, hal ini karena penelitian deskriptif kualitatif tidak ditujukan untuk menguji hipotesis, tetapi ditujukan untuk menganalisis atau menggambarkan suatu fenomena yang sedang diteliti dengan memaparkan fakta-fakta kejadian secara sistematis dan akurat.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Menurut (Ridha, 2017), mengatakan bahwa variabel tunggal atau independen adalah "semua sifat, sifat, dan nilai-nilai seseorang yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti". Berdasarkan pengertian variable tunggal diatas maka yang menjadi variable tunggal dalam penelitian ini adalah analisis pengadaaan. Lokasi penelitian yang sudah dipilih oleh peneliti adalah Desa Simanaere yang berada di jalan pelud binaka km. 14 Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, dengan waktu penelitian kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Click here to enter text.(Sujarweni & Utami, 2019) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari Pj. Kades, Kasi Seksi Pelayanan, Bidan Desa, dan Masyarakat di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari catatan, buku, terbitan berkala berupa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku teori, terbitan berkala, dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dari website atau artikel dan dokumen.

Instrumen adalah alat atau ruang tempat peneliti mengumpulkan informasi agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, akurat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Makbul, 2021). Alat penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, pulpen/bolpoin dan buku catatan.

Menurut (Anufia & Alhamid, 2019) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data nya adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan pada Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan secara tatap muka dengan Pj. Kades, Kepala Seksi Pelayanan, Kader Kesehatan/KPM, Bidan Desa, dan Masyarakat Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Dan dari sisi dokumentasi, secara detail bahan dokumentasi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku

atau catatan harian, kliping, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Teknik analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memperoleh data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang diberikan informan kunci dan informan pendukung dapat diketahui pengadaan makanan bergizi apabila dilihat dari sisi anggaran, maka hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere adalah dengan terlebih dahulu melakukan pendataan jumlah bayi dan balita yang terindikasi stunting maupun yang masih dalam tahap gejala. Kemudian berdasarkan data tersebut Pemerintah Desa Simanaere menyusun perencanaan anggaran Pengadaan Makanan Bergizi yang dimuat dalam APBDesa dan dibebankan dalam anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Adapun anggaran tersebut disusun untuk pengadaan makanan begizi seperti susu formula, bubur kacang hijau, jenis buah-buahan dan telur.

Pada proses perencanaan pengadaan yang akan dilakukan, maka pemerintah desa juga melihat sisi kemampuan anggaran Dana Desa untuk memenuhi segala bentuk pengadaan makanan bergizi yang akan dilakukan. Hal ini juga sesuai, jika dikaitkan dengan defenisi pengadaan yang disampaikan oleh Febriawati dalam (Sembiring & Siliwangi, 2017) searah dan sejalan, dimana dalam pengertian pengadaan yang disampaikan tersebut berkaitan dengan anggaran yang sudah disepakati untuk dilaksanakan, dimana Pemerintah Desa Simaere juga dalam menganggarkan pengadaan makanan bergizi terlebih dahulu menyusun anggaran dan melakukan evaluasi ke dinas terkait untuk disetujui anggarannya. Adapun pengadaan menurut Febriawati dalam (Sembiring & Siliwangi, 2017) adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penganggaran dalam APBDesa maka Pemerintah Desa melakukan evaluasi dan pengajuan kepihak Kantor Kecamatan dan Dinas PMDK dan setelah tahapan ini selesai pihak pemerintah daerah kemudian mengajukan pencairan anggaran dari rekening Pemerintah Pusat. Dalam proses evaluasi dan pengajuan, ini membutuhkan waktu yang cukup lama sampai anggaran tersebut masuk ke rekening Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek harga pembelian tidak terlepas dari sisi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Gunungsitoli. Dalam menentukan harga pembelian makan bergizi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak boleh melampaui Standart Satuan Harga (SSH), walaupun demikian pihak Pemerintah Desa sendiri selalu berupaya melakukan negosiasi dengan pihak pemasok agar memberikan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengadaan makanan bergizi yang dilakukan Pemerintah Desa Simanaere dalam penanganan stunting. Menurut (Utojo, 2019) tujuan Pengadaan (Procurement Goal) penyelenggaraan kegiatan Pengadaan adalah mewujudkan keterpaduan untuk memperoleh barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, sumber, waktu dan tempat dengan biaya yang optimal, mewujudkan sistem Pengadaan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan sistem Pengadaan strategis yang berorientasi pada optimalisasi hasil dan manfaat, memberikan akses keterbukaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi dalam proses Pengadaan untuk

memperoleh tata Kelola Pengadaan yang baik, sesuai prinsip dan aturan, memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi para pihak dalam kegiatan Pengadaan.

Dilihat dari segi biaya atau beban pada proses pengadaan makanan bergizi, berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dilokasi penelitian dapat diketahui bahwa beban pengadaan makan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere secara anggaran biaya sepenuhnya dibebankan dalam APBDesa yang dialokasikan dari Dana Desa (DD). Akan tetapi hal ini juga memiliki keterbatasan anggaran dalam pengadaan makan bergizi dikarenakan adanya kegiatan lainnya yang harus diprioritaskan pelaksanaannya dan bersumber dari anggaran Dana Desa.

Adapun prioritas lain dalam penggunaan anggaran Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salma, 2018 “Peranan E-procurement dalam Pencegahan Fraud, Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Prov. Sulawesi Selatan” dengan menggunakan metode kualitatif dikatakan bahwa Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan E-Procurement. Dalam pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan belum berjalan efektif, dikarenakan masih adanya main mata antara penyedia jasa dan panitia pengadaan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa metode pengadaan yang dilakukan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi yang menjadi faktor kegagalannya berbeda-beda. Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Salma, 2018 penyebab kegagalan pada pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan disebabkan ketidak transparanan dan kejujuran dari oknum yang melakukan pengadaan. Sedangkan faktor kegagalan proses pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere adalah disebabkan lambatnya pencairan anggaran serta keterbatasan jumlah anggaran yang dialokasi dalam pengadaan makanan bergizi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, peneliti mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam pengadaan makanan bergizi, sehingga masalah tersebut menyebabkan proses pengadaan makanan bergizi tidak berjalan secara efisien. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere adalah proses pencairan anggaran Dana Desa yang membutuhkan rentan waktu mulai dari tahap penyusunan anggaran, tahap pengajuan dan tahap persetujuan anggaran dari dinas terkait sebelum anggaran tersebut nantinya masuk ke rekening. Proses pengajuan ini biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan pada tahun anggaran berkenan, Dalam proses ini kemudian Pemerintah Desa terkendala dalam melakukan kegiatan pengadaan makanan bergizi dari awal tahun anggaran berkenan dikarenakan harus menunggu terlebih dahulu anggaran yang bersumber dari APBN masuk ke rekening desa.

Masalah yang ditimbulkan dalam proses ini menyebabkan bayi yang terindikasi stunting tidak dapat menerima makanan bergizi dari awal tahun, dan baru kemudian mereka menerima makanan bergizi pada bulan berkenan disaat anggaran dana desa dicairkan.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam pengadaan makanan bergizi, peneliti kemudian menilai bahwa inilah alasan sebagian pihak mengatakan bahwa pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere tidak efisien dan maksimal serta tergolong tidak rutin dan asal-asalan.

Permasalahan berikutnya yang ditemui oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam proses pengadaan makanan bergizi adalah keterbatasan anggaran Dana Desa dikarenakan adanya kegiatan lain yang harus ditangani yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana Desa. Keterbatasan anggaran ini kemudian menyebabkan pengadaan makanan bergizi yang dilakukan sangat terbatas. Permasalahan lain diluar dari tanggung jawab dalam pengadaan makanan bergizi adalah disebabkan oleh faktor perekonomian masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Desa berupaya dalam mencari solusi. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti dilapangan, adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain salah satunya Dinas Kesehatan dalam pemberian bantuan berupa penyuluhan ataupun mengajukan permintaan pengadaan makanan bergizi yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Hal ini juga sekaligus untuk membantu mengatasi keterbatasan anggaran yang tersedia. Kemudian melakukan evaluasi terhadap program pengadaan makanan bergizi yang sudah dilakukan, adapun tujuan evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang terbatas. Selain itu evaluasi ini dilakukan untuk menekan angka pengeluaran yang tidak efektif. Dan melakukan penyuluhan kepada kader kesehatan desa oleh Bidan desa tentang pengetahuan nutrisi dan gizi makanan. Hal ini bertujuan untuk membantu keefektifan pengadaan makanan bergizi di desa Simanaere sehingga penggunaan anggaran yang terbatas dapat digunakan dengan maksimal. Dalam memberikan penyuluhan terhadap kader kesehatan desa tentang pengetahuan nutrisi dan gizi makanan, jika dikaitkan dengan teori jenis pengadaan maka hal ini berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Click here to enter text.(Ramazan & Najamudin, 2021) dimana salah satu jenis pengadaan yang disampaikan beliau adalah “Perolehan jasa lainnya adalah jasa yang memerlukan keterampilan tertentu, yang mengutamakan keterampilan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu sistem manajemen yang dikenal luas dalam dunia usaha atau untuk melakukan suatu pekerjaan dan/atau memberikan jasa selain jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan pembelian barang.”

SIMPULAN

Proses pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere jika dilihat dari proses awal sudah sejalan prinsip teori pengadaan, dimana dalam proses pengadaan makanan bergizi sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan anggaran dalam APBDesa, evaluasi anggaran hingga pada tahap persetujuan anggaran dari Dinas terkait (Kantor Kecamatan, Dinas PMDK Kota Gunungsitoli). Akan tetapi proses pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan proses pencairan anggaran Desa membutuhkan rentang waktu berbulan-bulan sehingga proses pengadaan makanan bergizi yang direncanakan pemberiannya dari awal tahun tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah Desa telah melakukan upaya dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Simanaere, namun hal ini belum optimal dilakukan dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait sehingga timbul ketidaksesuaian antara rencana kerja dan realisasi anggaran. Selain itu minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan makanan bergizi juga menjadi salah satu faktor

penyebab kurangnya kualitas dari makanan bergizi yang disediakan bagi bayi dan balita penderita stunting, hal ini diungkapkan melalui wawancara salah seorang masyarakat bahwa masih ada makanan dalam kemasan yang disediakan sudah mendekati masa kadaluwarsa sehingga mereka memutuskan untuk tidak memberikan makanan tersebut kepada anak mereka. Ketersediaan anggaran juga mempengaruhi kuantitas belanja termasuk keterbatasan pendistribusian makanan bergizi bagi penderita stunting.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere dari permasalahan tersebut, melalui upaya koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait terkait penyediaan bantuan makanan bergizi bagi bayi dan balita penderita stunting. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan supply makanan bergizi dari Pemerintah Desa. Namun hal tersebut juga tidak maksimal, dikarenakan proses persetujuan dari dinas harus melalui beberapa prosedur.

Disarankan kepada Pemerintah Desa Simanaere, terkait permasalahan keterlambatan pencairan anggaran, hendaknya dalam proses pelaksanaan kegiatan terutama yang berbau kesehatan harus tetap diutamakan. Harus dijalin kerjasama dengan rekanan atau pengusaha penyedia makanan terutama bagi penderita stunting, penerapan ini bisa melalui sistem bon, dimana didahulukan dalam penyediaan barang, setelah pencairan anggaran baru dilaksanakan pembayaran sesuai faktur bon. Hal ini untuk mencegah keterlambatan penyaluran makanan bergizi bagi bayi dan balita yang terdampak stunting.

Kemudian disarankan untuk tetap menjaga koordinasi dengan instansi keuangan di Pemerintah Kota Gunungsitoli serta selalu memantau dan mengikuti setiap proses pengajuan anggaran yang dilakukan agar tidak mengalami keterlambatan yang berlarut-larut.

Dalam penanganan dan pencegahan stunting juga disarankan agar tidak hanya melalui penyediaan makanan saja, Pemerintah Desa juga wajib memberikan edukasi bagi orang tua bayi dan balita dalam menjaga kebersihan makanan, kebersihan lingkungan serta penggunaan sanitasi yang baik. Hal ini agar tetap terjaga keseimbangan antara peran makanan yang masuk ke dalam tubuh bayi dan balita juga dengan faktor lingkungan dimana bayi dan balita tersebut tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*.
- Arini, D., Mayasari, A. C., & Rustam, M. Z. A. (2019). Gangguan Perkembangan Motorik Dan Kognitif pada Anak Toodler yang Mengalami Stunting di Wilayah Pesisir Surabaya. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(2), 122–128.
- Fatmaningrum, W., Nadhiroh, S. R., Raikhani, A., Utomo, B., & Masluchah, L. (2022). Analisis Situasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting Dengan Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang Jawa Timur). *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 139–144.
- Harry Mulya Zein, M., Bintang Samuel Korompis, E., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 166–176. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.309>
- Jusniati, J., Parawangi, A., & Wahid, N. (2022). Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 599–611.
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing katalog dalam Pengadaan Barang/jasa pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa*, 1(1), 53–60.

- Kusrawan, K. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 271–284.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Megawati, G., & Wiramihardja, S. (2019). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 8(3), 154–159.
- Napitupulu, Y. V., & Karota, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Stunting Pada Balita Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 6(3), 149–154.
- Rachmawati, P. D., Pradanie, R., & Dwiwardani, R. L. (2018). Factors Affecting the Feeding Pattern of Under-Five Children with Stunting in Indonesia. *Children*, 2(110), 71–79.
- Ramazan, S., & Najamudin, N. (2021). Implementasi Sistem E-Procurement pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Public Service*, 1(1), 23–29.
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62–70.
- Sembiring, S., & Siliwangi, M. (2017). Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Bahan Laboratorium Amerind Bi0-Clinic (ABC). *Widya Cipta*, 1(2), 2550–2791.
- Setiawan, J., & Anggito, A. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *Sukabumi: CV Jejak*.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The master book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia.
- Utojo, H. I. (2019). *Manajemen pengadaan barang dan jasa*. Deepublish.